

COVID-19: KEBIJAKAN MITIGASI PENYEBARAN DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI DI INDONESIA

¹Engkus¹, Nanang Suparman², Fajar Tri Sakti³, Husen Saeful Anwar⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung.,

Jln. A.H. Nasution 105, Bandung, 40614

No Telp/ HP : ¹081322491989, ²082216266677, ³087722594013, ⁴081802041668,

⁵087880308953

E-mail: ¹ekustyana16@gmail.com, ²n.suparman69@gmail.com, ³fajr3sakti@gmail.com,

⁴husensaefulanwar@yahoo.com

Abstrak.

Kajian ini mendalami merebaknya covid-19 dan bagaimana penanganan dalam hal mitigasi penyebaran dan meminimalisasi dampak sosial ekonomi dengan kebijakan yang tepat dan terukur. Respon rasional pemerintah yang seharusnya dijalankan untuk mengantisipasinya adalah dengan melaksanakan perencanaan dan tindakan penutupan pintu masuk di seluruh bandara, pelabuhan dan akses masuk lainnya secara ketat sebagai bagian dari kebijakan. *lock down*, *social distancing*, atau *physical distancing*, seperti yang diberlakukan sejumlah negara yang terdampak, untuk masyarakat yang sudah terinfeksi disiapkan protocol penanganannya. Kebijakan pelonggaran akses masuk orang asing untuk tujuan pariwisata dan sikap *denying* terjadinya pandemik oleh pemerintah Indonesia dinilai berbagi pihak sebagai kebijakan blunder. Metode penelitian survey akademik data diambil dari laporan media masa, kajian para ahli, literature ilmiah, dan kajian Lembaga riset. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kebijakan yang tidak menempatkan kesungguhan pada fokus masalah dan tidak terukur dalam konteks penanganan wabah covid 19, maka pemerintah tidak akan dapat meminimalkan kematian akibat penyakit coronavirus 2019 (COVID19) dan dampak sosial ekonomi dari penyebaran virus akan sangat dalam dan serius.

Kata kunci: covid-19; kebijakan; mitigasi

Abstract

This study explores the outbreak of covid-19 and how it is handled in terms of mitigating the spread and minimizing socio-economic impacts with appropriate and measurable policies. The rational response of the government that should be implemented to anticipate it is by implementing planning and closing the entrance gate at all airports, ports and other access points as part of the policy. lock down, social distancing, or physical distancing, imposed by a number of countries affected, handling protocol prepared for people who are already infected. The policy of easing foreigners entry access for tourism purposes and the attitude of the pandemic by the Indonesian government is seen as sharing a blunder policy. Academic survey research methods data were taken from mass media reports, expert studies, scientetific literatures and research institute studies. The results of the study show that a policy that does not place seriousness on the focus of the problem and is not measurable in the context of the handling of the covid outbreak 19, the government will not be able to minimize deaths from coronavirus 2019 (COVID19) and the socioeconomic impact of the spread of the virus will be very deep and serious.

Keywords: covid-19; Policy; mitigation

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia dihadapkan pada situasi sulit terkait dengan pandemik covid 19 untuk menekan angka kematian penduduk yang terkena penyakit tersebut, dan dampak sosial ekonomi dari penyebarab virus. Kesigapan dan antisipasi penyebaran virus pada masa awal pandemik dipertanyakan banyak pihak. Paling tidak Badan Kesehatan Dunia (WHO) meragukan *claim* pemerintah bahwa Indonesia masih tergolong negara yang bebas penyebaran (Kontan.co.id., 2020)

Kelonggaran di pintu masuk bandara, berbeda dengan di negara-negara lain dimana bandara telah mengimplementasikan *protocol* pencegahan dan penerapan kebijakan *lock down*. Koordinasi yang lemah antar instansi

membuat masyarakat kebingungan mengikuti aturan pemerintah yang terkesan tumpang tindih antar instansi (CNN Indonesia | Kamis, 2020)

Lemahnya pengawasan (Engkus, Cecep Wahyu Hoerudin, 2019) terhadap bandara diikuti kejadian pertama pada terpaparnya korban positif Corona di Indonesia. Dua warga Indonesia dinyatakan positif COVID-19 pada 2 Maret diumumkan langsung oleh kepala negara. Dengan identifikasi pasien 01 dan 02 terkait kasus ke-24 Malaysia yang dinyatakan. Laporan hasil survey kolaboratif 12 institusi termasuk Harvard, Cambridge, Warwick menempatkan Indonesia buruk menurut persepsi masyarakat dalam penanganan covid-19 penjelasan hasil survey mendekati angka nol, semakin bagus hasil persepsi publiknya, berikut hasilnya (a) Indonesia: 0,919 pada skala 0-1; (b) Malaysia:0,0522; (c) Filipina: 0,671; (d). Italia: 0,296; (e) China: 0,116 (DetikNews, 2020).

Kebijakan pemerintah pada respon awal menyikapi *pandemic covid* 19 dinilai sebagai sebuah langkah blunder dan membahayakan. Pihak-pihak kritis di Indonesia bahkan mengambil langkah tegas Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) melayangkan Class Action untuk kelambanan pemerintah dalam merespon COVID-19.j (<https://threechannel.co/category/aspirasi-warga/>, 2020)

Secara konseptual, muncul pertanyaan tentang kedudukan ilmu kebijakan dalam memahami krisis semacam itu. (Lasswell, n.d.) melihat ilmu kebijakan memberikan wawasan tentang situasi seperti itu, menantang dan menginformasikan proses dan keputusan yang sedang berlangsung, dan meramalkan skenario masa depan, semua dengan maksud mengarahkan pemerintah dan masyarakat menuju martabat manusia yang lebih besar untuk semua. Sejak pencanangan visi keilmuan lebih dari tujuh dekade yang lalu, ilmu kebijakan telah berkembang menjadi bidang keilmuan yang dinamis, ditandai dengan kekayaan konseptual, keragaman teoretis, dan pluralisme metodologis (Cairney, P., & Weible, 2017);(Torgerson, 2017). Penilaian demikian berkaca pada visi Lasswell dengan menanggapi pertanyaan berikut: Wawasan apa yang ditawarkan ilmu kebijakan untuk membantu pemerintah dan masyarakat memahami pandemi COVID-19?

Jawaban pertanyaan di atas merujuk pada sepuluh perspektif kebijakan yang ditampilkan dalam literatur ilmu kebijakan. Perspektif yang menarik inspirasi dari penggambaran komprehensif (Lasswell, 1956) tentang elemen-elemen fungsional yang membentuk kebijakan publik. Hal ini tentu membutuhkan lebih dari menganalisis aspek tunggal dari kebijakan publik atau keputusan kebijakan khusus dan memahami dinamika proses, aktor, dan interaksi yang membentuk keputusan kebijakan dalam menanggapi COVID-

19. termasuk perspektif tentang pembuatan kebijakan (dalam negara), respons dan manajemen krisis, pembuatan kebijakan global dan administrasi transnasional, jaringan kebijakan, implementasi dan administrasi, keahlian ilmiah dan teknis, emosi, narasi dan pesan, pembelajaran, keberhasilan dan kegagalan kebijakan.

COVID-19 telah memunculkan adopsi berbagai kebijakan publik oleh pemerintah, dengan berbagai desain dan konten kebijakan yang beragam. Sebagian besar negara telah menutup (*lock down*) atau membatasi perbatasan mereka dan membatasi perjalanan di dalam perbatasan (*social distancing*). Sepertiga dari populasi dunia telah mengalami beberapa pembatasan sosial (dari penutupan sekolah hingga tinggal di rumah). Keputusan kebijakan ini ada di berbagai tingkat pemerintahan. Misalnya, beberapa terjadi di tingkat nasional, seperti penguncian terbesar di dunia yang menargetkan 1,3 miliar penduduk India, atau di tingkat daerah atau lokal, seperti undang-undang negara bagian California untuk melarang pengusuran penyewa properti komersial.

Pemerintah mengadopsi kebijakan publik melalui jalur yang berbeda. Ada yang sejalan dengan konsep literatur tentang perubahan kebijakan (Weible, C. M., & Sabatier, 2017) dimana perubahan kebijakan selama COVID-19 meliputi: (1) pembelajaran, seperti yang ditunjukkan dalam cara pergeseran Pemerintah Inggris dari mitigasi (penutupan parsial) ke penekanan. (penguncian ketat) setelah proyeksi infeksi dan konsekuensi kematian sebelumnya (Walker, G. T. P., 2020); (2) negosiasi perjanjian, seperti yang diilustrasikan oleh berlalunya paket stimulus di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat (Werner, 2020) , Kanada (Bologaro, 2020), dan Jepang (Kyodo, 2020); dan (3) menyebarkan dan mentransfer ide-ide lintas pemerintah, dengan banyak pelajaran menarik dari pengujian Korea Selatan yang luas dan karantina yang ketat di Tiongkok. Keputusan kebijakan selanjutnya dikondisikan oleh faktor kontekstual, termasuk faktor kelembagaan (mis., Struktur konstitusional dan legalistik), orientasi budaya, ekonomi, dan politik. Misalnya, respons Swedia terhadap COVID-19 sejauh ini telah menghindari banyak penguncian seperti negara lain, respons yang sebagian dikaitkan dengan budaya kepercayaan dan tanggung jawab. Akhirnya, mendorong semua perubahan ini adalah kejutan dari COVID-19 itu sendiri, yang secara langsung mempengaruhi sistem perawatan kesehatan di seluruh dunia, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bidang kebijakan lainnya, misalnya, dengan menunda reformasi birokrasi, kebijakan infrastruktur, dan tindakan lain dengan prioritas yang tidak urgen.

Adopsi kebijakan pemerintah Indonesia yang terkesan mengutamakan aspek ekonomi daripada fokus penanganan penyakit yang mengancam keselamatan warga negara telah berdampak besar pada ancaman serius

keselamatan warga negara dan ancaman nyata pada konstruksi pelemahan perokonomian nasional (Sakti, F. T., & Pribadi, 2018). Langkah-langkah konkrit pemerintah untuk mengatasi situasi tidak semakin memburuk dan tantangan-tantangan yang dihadapi menjadi fokus kajian literatur ini.

2. Metodologi

Kajian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pendekatan survey literatur akademik dan bersifat *inferential* di bidang kebijakan publik dengan tujuan untuk memperoleh konsep dan teori yang relevan dengan kajian pada kebijakan penanganan wabah covid 19. Bersifat *inferential*, yaitu metode penelitian untuk masalah-masalah yang aktual yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat, Singarimbun dalam (Engkus, 2017)

Data yang diperoleh melalui upaya penelusuran berbagai sumber baik dari hasil kajian para pakar kesehatan, pemerhati kebijakan, literatur ilmiah, hasil survey Lembaga independen, hasil penelitian akademisi kebijakan publik maupun sumber tulisan dari berbagai media masa baik cetak maupun elektronik untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penanganan wabah covid 19. Dengan demikian data yang diperoleh tergolong sebagai jenis data sekunder yang selanjutnya dirubah dalam bentuk narasi maupun angka-angka sesuai dengan kebutuhan tampilan data. Tahap selanjutnya data tersebut dianalisis berdasarkan teori dan konsep kebijakan publik bidang kesehatan masyarakat dan diberikan pemaknaan melalui proses intepretasi data.

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan yang dianggap keliru

Komunikasi politik kabinet Presiden Joko Widodo selama pandemi Covid-19. Menjadi sorotan public dan menghasilkan beragam analisis yang benang merahnya adalah selama menghadapi pandemi yang disebabkan virus corona itu ditemukan bahwa pemerintah banyak melakukan blunder atau kekeliruan dalam berkomunikasi. Selama kurun waktu 1 Januari hingga 5 April 2020, LP3ES menemukan adanya 37 pernyataan blunder pernyataan pemerintah terkait virus corona atau Covid-19.

Dalam tempo kurang dari 100 hari sejak wabah corona menjadi isu dan ancaman di Indonesia sejak akhir Januari, telah ada 37 pernyataan blunder yang dikeluarkan Jokowi dan kabinetnya dalam penanganan Covid-19, kata Direktur *Center for Media and Democracy* LP3ES, Wijayanto, saat konferensi pers, Senin (6/4/2020). Wijayanto merinci, dari 37 pernyataan blunder itu, 13 diantaranya terjadi pada masa pra-krisis Covid-19. Kemudian,

4 pernyataan terjadi selama masa awal krisis, dan 20 pernyataan terjadi di masa krisis. Pernyataan ini disampaikan oleh berbagai pejabat, dari yang tertinggi hingga tingkat eselon 1. Pejabat itu dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menko Maritim, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Menteri Pariwisata, Juru Bicara Presiden, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, hingga Dirjen Perhubungan.

Pada fase pra krisis yang dimulai dari akhir Januari hingga awal Maret 2020, pemerintah dinilai tidak serius, menyepelekan, bahkan menolak kemungkinan adanya kasus virus corona di Indonesia. Baca juga: Jokowi Minta Perbanyak Acara di Daerah Wisata yang Terdampak Virus Corona Wijayanto mencontohkan, pada pertengahan Februari misalnya, melalui akun Twitter-nya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Covid-19 tak masuk ke Indonesia karena perizinannya susah. Lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat menyebut bahwa virus corona menyingkir dari Indonesia karena doa qunut. Saat itu belum ditemukan pasien Covid-19 di Tanah Air tidak hanya itu, ketika negara lain mulai memberlakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus corona, presiden hingga sejumlah menteri justru menyebut bakal menggalakkan sektor pariwisata. Menurut Wijayanto, sikap denial atau penolakan pemerintah ini menyebabkan publik gagal menyiapkan diri menghadapi pandemi. "Sehingga yang muncul adalah kepanikan dalam berbagai bentuk mulai dari *panic buying*, stigma pada pengidap corona yang melahirkan *bullying* pada pasien corona, juga termanifestasi dengan penolakan untuk isolasi bagi mereka yang ODP (orang dalam pemantauan)," ujar dia.

Pada fase awal krisis yaitu 2 hingga 14 Maret 2020, pemerintah juga melakukan blunder komunikasi politik. Wijayanto mencontohkan, blunder pada fase ini misalnya ketika pemerintah inkonsisten menyatakan kasus seorang pasien di Cianjur meninggal dunia bukan karena Covid-19, tapi kemudian diralat sebagai pasien positif terinfeksi corona. (Wijayanto., 2020)

Pada masa itu, Ma'ruf Amin masih sempat melontarkan candaan yang menyebut bahwa susu kuda liar bisa menangkal Covid-19. Blunder terbanyak terjadi di fase krisis. Mulai dari pernyataan Jokowi mengenai status darurat sipil yang diralat menjadi darurat kesehatan, soal kelonggaran kredit kendaraan yang ternyata diperuntukkan bagi pasien positif corona, hingga polemik mudik. "Presiden mulanya memberi larangan mudik untuk menghindari penularan corona yang diamini oleh Jubir Covid, Jubir Presiden, Mensesneg. Namun pernyataan itu kemudian direvisi oleh Jubir Presiden dan Menko Kemaritiman yang menyampaikan bahwa mudik diperbolehkan asal melakukan isolasi," ujar Wijayanto (TibunPekanbaru.com, n.d.)

Kebijakan Insentif Diskon Tiket Pesawat.

Sebelum dikabarkan memiliki kasus positif Corona, Indonesia tengah melakukan negosiasi pada pemerintah Arab Saudi untuk melancarkan jemaah umrah asal RI bisa masuk ke Mekkah dan Madinah. Pasalnya, pemerintah begitu percaya diri, karena selama dua bulan terakhir di Indonesia belum ada masyarakat yang terpapar kasus Corona. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia sampai membuat insentif untuk maskapai penerbangan karena ada penurunan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Bukan main-main, insentif yang diberikan pemerintah hampir Rp 1 triliun, agar masyarakat Indonesia mau bepergian. Strategi ini dianggap efisien untuk menutup penurunan jumlah wisatawan luar negeri yang bermobilitas di Indonesia.

Beberapa hari yang lalu dua WNI yang berdomisili di Depok dilaporkan positif COVID-19. Presiden Joko Widodo sendiri yang menyampaikan pernyataan itu. Namun, nampaknya hal itu tak menyurutkan niat pemerintah untuk tetap "menyelamatkan" industri pariwisata dalam negeri. Pemerintah bahkan masih bersikeras mau melanjutkan insentif untuk maskapai penerbangan. Presiden Jokowi menyebut bahwa pemberian diskon tiket dan sejumlah insentif tarif hotel untuk 10 daerah wisata di Indonesia tak akan menambah penyebaran Virus Corona jenis baru (COVID-19) di Indonesia. Hal itu ia sampaikan menanggapi kekhawatiran meluasnya Corona di Indonesia jika wisatawan mancanegara makin banyak yang berdatangan. "Tidak, insentif itu kan kita berikan kepada wisatawan dari daerah-daerah yang sudah diperkirakan tidak menjadi episentrum dari virus Corona," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3/2020) seperti dikutip Antara. Penyebaran virus corona juga ditanggapi santai oleh Dirut Garuda Indonesia, ia mengatakan. Belum ada kebijakan berupa tindakan preventif (Suparman, 2018), yang dilakukan untuk mencegah virus Corona.

Kebijakan ini pun akhirnya menuai protes. Ada kekhawatiran, tanpa ada persiapan matang untukantisipasi, berbagai negosiasi dan insentif yang diberikan pemerintah Indonesia tersebut akhirnya tidak berguna bahkan bisa jadi blunder karena sangat mungkin membuat penyebaran virus Corona semakin ganas ke berbagai wilayah di Indonesia. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menjelaskan, baiknya kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia fokus pada pembatasan akses di wilayah yang sudah terpapar seperti yang dilakukan negara lain. "Baiknya kalau mau kasih insentif itu, berikan juga rasa aman. Misalnya dengan memperlengkap fasilitas di berbagai pintu masuk. Kan sekarang di bandara daerah enggak semua punya alat thermal scanner," jelas dia pada Tirto, Senin (2/3/2020). Ia melanjutkan, jangan sampai langkah yang diambil pemerintah malah membuat jumlah korban yang terpapar Corona di Indonesia meledak (*outbreak*) karena Pemerintah Indonesia tidak siap untuk menghadapi virus tersebut. (Janah, 2020), Senada dengan Trubus, Pengamat Penerbangan Alvin

lie menjelaskan, saat ini wisatawan domestik sudah takut untuk bepergian. Insentif yang diberikan oleh pemerintah sebaiknya difokuskan untuk kepentingan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE). (Janah, 2020). Wisatawan, menurutnya, justru berkurang lantaran masyarakat yang khawatir untuk bermobilitas. Persoalan ini tak hanya milik Indonesia, melainkan problem global. "Lebih baik pesawatnya dikandangkan daripada dia terbang juga dia rugi banyak. Karena mau dikasih diskon berapapun itu tidak akan banyak pengaruh," kata dia. Daripada pemerintah mengurus pariwisata, Alvin justru menyarankan Indonesia untuk memperketat pengawasan di pintu masuk agar berstandar internasional. Apa lagi, warga Jepang yang disebut-sebut menularkan virus Corona ke RI baru terdeteksi setelah berada di Malaysia. Artinya, ada yang salah dengan sistem pemeriksaan di Indonesia hingga tak mendeteksi gejala virus Corona tersebut.

Pemerintah perlu meyakinkan dunia, bahwa Indonesia mengeluarkan kebijakan serius (Engkus, 2017), menangani Corona. Salah satunya dengan meningkatkan sistem pemantau gejala awal Corona seperti kamera *thermal* atau kamera pemantau suhu tubuh.

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Pengembangan Wabah Covid – 19

Perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin membesar dan meluas menekan pihak pemerintah untuk meninjau ulang sejumlah kebijakan sebelumnya dengan rilis yang dikeluarkan kementerian luar negeri catatan kebijakan itu antara lain: pertama, Indonesia terus mengamati dengan seksama laporan situasi WHO tentang perkembangan wabah virus COVID-19 di seluruh dunia. 2) Menurut laporan WHO terbaru, saat ini ada peningkatan yang signifikan dari kasus COVID-19 di luar China, khususnya di tiga negara: Iran, Italia, dan Republik Korea (Korea Selatan). 3). Demi kesehatan masyarakat, Indonesia telah mengeluarkan tindakan sementara untuk pengunjung / pelancong yang datang dari tiga negara tersebut sebagai berikut: Pertama, menanggukhkan entri atau transit di Indonesia untuk pengunjung / pelancong yang datang yang telah melakukan perjalanan ke kota / wilayah berikut dalam 14 hari terakhir:

Iran : Kota Tehran dan Qom dan termasuk Provinsi Gilan

Italia : Wilayah yang mencakup Lombardi, Veneto, Emilia Romagna, Marche, dan Piedmont

Korea Selatan: Kota Daegu dan Provinsi Gyeongsangbuk-do.

Kedua, bagi semua pengunjung/*travelers* dari wilayah di luar yang disebutkan di atas di Iran, Italy, dan Korea Selatan, sebuah sertifikat Kesehatan yang dikeluarkan oleh otoritas pejabat Kesehatan yang tiap negara yang disebutkan akan dimintakan wajib. Sertifikat sehat tersebut harus masih berlaku dan diperlihatkan kepada petugas penerbangan pada saat *check-in*. Tanpa sertifikat dari Otoritas Kesehatan, pengunjung / pelancong tersebut tidak akan diizinkan untuk masuk atau transit ke Indonesia.

Ketiga, sebelum pendaratan, pengunjung/pelancong yang datang dari tiga negara tersebut diminta untuk melengkapi Kartu Kewaspadaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kartu Peringatan Kesehatan terdiri dari pertanyaan tentang riwayat perjalanan pengunjung. Jika pengunjung telah melakukan perjalanan di salah satu daerah tersebut dalam 14 hari terakhir, pengunjung tersebut tidak akan diizinkan untuk masuk atau transit ke Indonesia.

Keempat, untuk warga negara Indonesia yang baru-baru ini melakukan perjalanan ke salah satu negara yang disebutkan di atas, terutama di daerah tersebut, pemeriksaan kesehatan tambahan diperlukan pada saat kedatangan di bandara. (1) Langkah-langkah ini akan segera berlaku pada hari Minggu, 8 Maret 2020 pukul 00.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7). (2) Langkah-langkah ini bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan selanjutnya.

Diskusi

Merebaknya COVID-19 menjadi ancaman nyata bagi kesehatan global, beban serta tantangan serius untuk semua negara. Pemerintah perlu merumuskan langkah-langkah efektif untuk mencegah penyebaran yang semakin meluas melalui upaya penerapan diagnosis dini (*rapid-test*), diagnosis lanjutan yang akurat (*swab-test*) pencegahan, pedoman pengobatan, dan sosialisasi yang luas. Protocol pencegahan dan pengobatan harus dirumuskan secara jelas, kebijakan nasional terkait pembatasan social harus dijalankan secara *firm* dan solid.

Kepemimpinan yang kuat dan komitmen dari seluruh elit politik di dalam negeri, pihak swasta, dan masyarakat luas adalah faktor penting keberhasilan kerja pemerintah, dilengkapi dengan upaya bersama yang terkoordinasi dari Kelompok Kerja sehingga membantu memobilisasi berbagai pihak secara sektoral dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Implementasi sistem kesehatan dengan tulang punggung kesiapan tenaga medis dan rumah sakit mencakup kegiatan pengawasan, pencegahan, dan perawatan kuratif COVID-19 adalah penting, tercermin dalam visi dan tindakan yang jelas pada deteksi, konfirmasi kasus dan dugaan kontak yang dekat, dan perawatan intensif untuk kasus-kasus positif. Selain itu, upaya bersama lintas sektor dan berbagai strata yang berbeda dalam melacak kontak orang dalam pengawasan (ODP), pemberlakuan isolasi untuk kasus yang diduga reaktif tertular, dengan ruang isolasi yang telah disiapkan untuk orang-orang yang kembali dari luar negeri atau tempat dengan status zona merah selama 14 (empat belas hari) hari, membantu meminimalkan risiko penularan di masyarakat.

Transparansi informasi yang selalu diperbarui terkait jumlah ODP, PDP, positif corona, dan yang meninggal dunia. Pesan komunikasi yang jelas tentang COVID-19 melalui media resmi dan media sosial merupakan kontributor penting untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sosial. Indonesia sebagai negara akses terbuka berinteraksi dengan negara-negara ASEAN, Australia, Asia dan dunia internasional lainnya yang sangat memungkinkan melibatkan orang-orang yang masuk sebagai *courier* virus COVID-19. Pengalaman dan praktek kebijakan penutupan ketat pintu masuk yang diterapkan negara-negara yang berinteraksi dengan Indonesia yang disebutkan di atas dapat diterapkan di tanah air. Secara factual terdapat berbagai pendekatan berbeda terkait penanganan COVID-19. Sebagai contoh, pemerintah Korea Selatan menerapkan pendekatan yang sangat liberal dengan tidak ada penutupan (lock down), didukung oleh pengujian masal (*rapid test*), (Soonman KWON, 2020), yang secara konseptual berbeda dengan di negara lain yang menerapkan pengetatan. Bauran komando, pengendalian, insentif bagi para tenaga medis, bantuan social bagi masyarakat yang terkena PHK, rawan daya beli, dan komunikasi politik pemerintah adalah kunci keberhasilan mewujudkan kepatuhan publik terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah pusat lebih menekankan peran pada manajemen pusat dan kepemimpinan oleh Kementerian Kesehatan dan BNPB sebagai leading sektor.. Pada akhirnya, setiap respons dalam situasi yang tidak normal seperti yang terjadi sekarang ini perlu langkah dan tindakan dari kebijakan publik yang spesifik dengan cakupan konteks global dan nasional, dan idealnya mengadopsi pengalaman dan praktik yang terdokumentasi dari konteks yang berbeda (*benchmarking*) negara lain.

4. Simpulan

Kebijakan yang tidak menempatkan kesungguhan pada fokus masalah dan tidak terukur dalam konteks penanganan wabah covid 19, maka pemerintah tidak akan dapat meminimalkan kematian akibat virus 2019 (COVID19) dan dampak sosial ekonomi dari penyebaran virus akan sangat dalam dan serius.

Menjaga angka kematian serendah mungkin akan menjadi prioritas tertinggi kinerja pemerintah, maka dari itu pemerintah harus membuat langkah-langkah untuk memperbaiki penurunan ekonomi yang tak terhindarkan. Bukti empirik COVID19 telah berkembang menjadi pandemi, dengan rantai penularan kecil di banyak negara dan rantai besar yang mengakibatkan penyebaran luas di beberapa negara, seperti Italia, Iran, Korea Selatan, dan Jepang. Sebagian besar negara cenderung memiliki penyebaran COVID19, setidaknya pada tahap awal, sebelum tindakan mitigasi memiliki dampak.

Dimungkinkan ada keputusan sulit di depan untuk pemerintah. bagaimana individu menanggapi saran tentang cara terbaik mencegah penularan akan sama pentingnya dengan tindakan pemerintah dalam pengimplementasiannya. Strategi komunikasi kebijakan pemerintah untuk memberi informasi kepada publik tentang cara terbaik untuk menghindari infeksi sangat penting, demikian juga dukungan sumber daya ekstra untuk mengelola penurunan ekonomi dan kemungkinan gejolak sosial.

Referensi

Bologaro, I. (2020). Trudeau wins opposition backing for \$57 billion virus aid package.

Cairney, P., & Weible, C. M. (2017). The new policy sciences: Combining the cognitive science of choice, multiple theories of context, and basic and applied analysis. *Policy Sciences*, 50(4), 619–627.

CNN Indonesia | Kamis, 13/02/2020 08:29 WIB. (2020). Alasan Harvard Prediksi Virus Corona Sudah Masuk ke Indonesia.

DetikNews, D. D.-. (2020). Hensat: RI Dapat Persepsi Terburuk soal Penanganan Corona.

E, E. (2017). *Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: El-Markazi.

Engkus, Cecep Wahyu Hoerudin, D. Y. M. (2019). Supervision and Control of The Government Internal Supervisory Apparatus in The Implementation of Regional Autonomy. *International Journal of Science and Society*, 1(1), 56–69.

- Engkus, E. (2017). Implementasi Undang-Undang Perdagangan Dan Implikasinya Dalam Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. *LITIGASI*, 18(1), 2442–2272.
- <https://threechannel.co/category/aspirasi-warga/>. (2020). Gugat Jokowi! Karena Dianggap Telat Dalam Merespon Wabah Covid-19 570.
- Janah, S. M. (2020). Blunder Jokowi Hadapi Corona, Berikan Insentif Diskon Tiket Pesawat.
- Kontan.co.id. (2020). Kasus virus corona masih negatif di Indonesia, namun WHO peringatkan hal ini.
- Kyodo, J. (2020). Japan may dish out cash to households impacted by coronavirus. 2020, *March 14, 2020*.
- Lasswell, H. D. (n.d.). The political science of science: An inquiry into the possible reconciliation of mastery and freedom. *American Political Science Review*, 50(4), 961–979.
- Lasswell, H. D. (1956). *The decision process: Seven categories of functional analysis*. Maryland: Bureau of Governmental Research, College of Business and Public Administration. University of Maryland.
- Sakti, F. T., & Pribadi, G. (2018). Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 98–116.
- Soonman KWON. (2020). COVID-19: Lessons from South. Korea.
- Suparman, N. (2018). *Reformasi Birokrasi*. Bandung: Ushuludin ISBN.
- TibunPekanbaru.com. (n.d.). Puluhan Pernyataan BLUNDER Kabinet Jokowi Soal Wabah Corona di Indonesia.
- Torgerson, D. (2017). Policy sciences and democracy: A reexamination. *Policy Sciences*, 50(3), 339–350.
- Walker, G. T. P., et al. (2020). *The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression*. WHO Collaborating Centre for Infectious Disease Modelling, MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis, Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics. London: Imperial College.
- Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (Eds. . (2017). *Theories of the policy*

process. New York: Hachette.

Werner, et al. (2020). Negotiations intensify on Capitol Hill over massive stimulus legislation as coronavirus fallout worsens.

Wijayanto. (2020). Selama Pandemi Corona, LP3ES Catat 37 Pernyataan Blunder Jokowi dan Kabinetnya, Termasuk Galakkan Pariwisata.